

PENGARUH KEPEMIMPINAN PRESIDEN DUTERTE TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL FILIPINA DENGAN CINA

Bayu Arihito¹
NIM. 1002045074

Abstract

Rodrigo Duterte is a president of Philippines since June 30, 2016 who was elected through Philippines's elections. In a few months as President, Rodrigo Duterte announced his policy to get closer to China and separation from the United States which was his longstanding ally. Idiosyncratic and Bilateral Relations Concept as conceptual framework are used to answer the research question. The results show that President Duterte's leadership brings a positive influence in bilateral relations between the Philippines and China. His policy to establishing good relations with China is influenced by his idiosyncratic factors namely, his values, his life experience, his talents, and his personality. It makes President Duterte rationally and courageously prefer to establish good relations between the Philippines and China in the national interest of the Philippines.

Keywords : *Rodrigo Duterte, Idiosyncratic, Philippines – China*

Pendahuluan

Filipina merupakan jajahan Spanyol sejak tahun 1565, hingga pada tahun 1898 Amerika Serikat mengambil alih kekuasaan atas wilayah Filipina pasca perang Spanyol-Amerika yang kemudian menjadi negara persemakmuran di bawah Amerika Serikat. Periode persemakmuran di bawah Amerika Serikat sempat terhenti pada Perang Dunia II saat Jepang menguasai wilayah Filipina. Amerika Serikat kemudian memberikan kemerdekaan secara de facto kepada Filipina pada 4 Juli 1946 melalui Treaty of Manila (treaties.un.org).

Untuk kepentingan hubungan luar negeri, telah terjadi beberapa perubahan mengenai peraturan yang melandasi pelaksanaan urusan luar negeri Filipina. Pada masa pra kemerdekaan digunakan Konstitusi 1935 yang kemudian diganti sementara dengan Konstitusi 1943 pada kependudukan Jepang. Hal ini berjalan hingga dibuat Konstitusi 1973 dengan adanya pasal II bagian 3, yang menerima hukum internasional yang berlaku serta menganut kebijakan damai, kesetaraan, keadilan, kebebasan, kerjasama, dan persahabatan dengan semua bangsa (www.gov.ph).

¹ Mahasiswa S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Arihito19@gmail.com

Perubahan mengenai landasan politik luar negeri Filipina terjadi pada tahun 1986 yang diakibatkan oleh kudeta terhadap Presiden Marcos, yang menyebabkan adanya pembentukan Konstitusi 1987, yang digunakan hingga sekarang. Filipina saat ini melandaskan hubungan luar negerinya berdasarkan Konstitusi Filipina 1987 Pasal II Bagian 7 yang menyatakan bahwa : “Negara harus mengejar kebijakan luar negeri yang independen dalam hubungan dengan negara-negara lain pertimbangan penting harus berdasarkan kedaulatan nasional, integritas wilayah, kepentingan nasional, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.”(www.dfa.gov.ph)

Konstitusi 1987 tersebut juga menyinggung mengenai pencapaian tiga target utama dalam hubungan luar negeri Filipina, yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik No. 7157. Adapun 3 target tersebut mencakup : (1) Meningkatkan keamanan negara, (2) Mendorong perkembangan ekonomi, (3) Melindungi warga negara Filipina di luar negeri. Kemudian untuk memenuhi tiga target dalam pelaksanaan hubungan luar negerinya tersebut, Filipina menjalin kerjasama secara bilateral maupun multilateral, khususnya dengan Amerika Serikat, Jepang dan Cina.(www.dfa.gov.ph)

Menurut sejarah, interaksi Filipina – Cina sudah dimulai sejak tahun 982 M, saat pedagang Mindoro dari Filipina datang dan berdagang di pesisir Guangzhou berupa kain rami, cangkang penyu, mutiara dan lilin kuning Filipina dan membawa pulang sutra, porselen, gelas kaca, manik-manik dan peralatan logam dari Cina,(www.globalsecurity.org) di wilayah Siquijor Filipina, terlihat perdagangan yang terjadi dari pedagang Cina di Filipina melibatkan barang-barang seperti tanaman-tanaman obat, keramik Cina dan perabotan Cina lainnya.(www.dumagueteinfo.com)

Pada masa kolonial Spanyol di Filipina, perdagangan dengan pedagang-pedagang Cina di Manila, Filipina sudah berkembang, hal tersebut dimanfaatkan Spanyol untuk menyokong perekonomian koloni Spanyol yang lain seperti koloni di Meksiko dengan menjalin kerjasama perdagangan dengan pedagang Cina, dan Filipina menjadi wilayah transit barang.(Aileen Baviera and Lydia Yu-Jose, 1998)

Pasca kemerdekaan Filipina, hubungan dengan Cina menjadi renggang terutama pada masa Perang Dingin. Berdasarkan pandangan ideologi Filipina pada pemerintahan Presiden Roxas yang merupakan anti komunis, dan juga terkait pengaruh Amerika Serikat, Filipina memilih tidak melakukan hubungan formal dengan Cina (RRC) serta membuat peraturan melarang adanya paham komunisme di Filipina dan mengeluarkan kebijakan larangan perjalanan ke Cina (RRC) dibawah aturan *Republic Act 1700*.(Bobby M.. Tuazon, 2014)

Perubahan kebijakan pemerintahan Filipina terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Marcos yang kemudian mulai membuka ruang untuk negara-negara sosialis utamanya dengan Cina (RRC), tidak hanya untuk kemungkinan menjalin kerjasama perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber perdagangan, namun juga terkait bidang keamanan. Pandangan Presiden Marcos menganggap Cina (RRC) tidak bisa dipandang sebelah mata lagi.(www.asj.upd.edu.ph)

Kebijakan ini dilakukan oleh Presiden Marcos sebagai bagian kebijakan luar negerinya yaitu “*for a closer study of Asia and for the Philippines to accelerate trade with other Asian and socialist countries*”. Selain itu, karena partner utama perdagangan Filipina, Amerika Serikat, mengurangi tingkat perdagangannya dengan Filipina, dan terjadinya krisis minyak di Filipina serta berakhirnya perjanjian Laurel-Langley antara Filipina dengan Amerika Serikat. Hal-hal tersebut mendorong Presiden Marcos untuk mencari partner perdagangan alternatif selain Amerika Serikat. Sehingga Filipina mulai membangun hubungan dengan Cina dan Uni Soviet. (Benito Lim, 1999)

Pada 9 Juni 1975, Presiden Marcos membuka hubungan diplomatik secara resmi dengan RRC ditandai dengan penandatanganan pernyataan antara Presiden Marcos dengan Perdana Menteri Zhou Enlai dan mengakui kebijakan One China Policy. Hal tersebut kemudian ditandai dengan berakhirnya kebijakan larangan perjalanan ke negara-negara sosialis seperti Cina, Rusia, Hungaria, Jerman Timur, Bulgaria, Polandia, Ceko, Slovakia, dan Mongolia. Kebijakan ini kemudian menghasilkan nilai perdagangan hingga \$80.399.309 dengan negara-negara tersebut, dan 49% berasal dari perdagangan dengan Cina. (Benito Lim, 1999)

Pada masa pemerintahan Presiden Gloria M. Arroyo, dimana Filipina dalam hubungan luar negerinya lebih berdasarkan pembangunan pertumbuhan ekonomi, serta mempertahankan hubungan yang bersahabat, dan produktif dengan negara-negara lainnya. Hubungan Filipina dengan Cina pada pemerintahan Presiden Arroyo bisa disebut masa “*Golden Age of Partnership*” antara kedua negara. Cina pada masa ini menjadi partner perdagangan terbesar ketiga, termasuk sepuluh besar negara dengan investasi besar di Filipina dan empat besar pemasok devisa dari turis Cina yang berkunjung ke Filipina. (Bobby M. Tuazon, 2014)

Tahun 2010-2016, pada masa pemerintahan Presiden Aquino III, pemerintah menghadapi krisis-krisis yang berpengaruh terhadap hubungan Filipina-Cina. Hubungan kedua negara kemudian berada di tingkat yang mengkhawatirkan saat dilakukannya petisi arbitrase oleh pemerintah Filipina terhadap Cina kepada Mahkamah Internasional Atas Hukum Laut (ITLOS) pada Maret 2014 untuk menyelesaikan konflik wilayah di Laut Cina Selatan. Hal tersebut menyebabkan Menteri Luar Negeri Cina melayangkan protes diplomatik kepada Filipina di bawah Presiden Aquino III yang dianggap merusak hubungan bersahabat kedua negara serta mengatakan seharusnya masalah kedaulatan seharusnya melalui negosiasi antara negara-negara yang terlibat dalam konflik wilayah, baik bilateral maupun multilateral. (Bobby M. Tuazon, 2014)

Sejak 30 Juni 2016, kursi kepemimpinan di Filipina berganti. Rodrigo Duterte resmi menjadi Presiden Filipina ke 16. Presiden Duterte kemudian menjadi kontroversi baik dalam maupun luar negeri akan kebijakan-kebijakan dalam kepemimpinannya. Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan tekadnya untuk membawa perubahan di negara Filipina. “*Real change, this is the direction of our government*”, itulah yang dikatakan Presiden Rodrigo Duterte saat dilantik sebagai presiden dan sedang berusaha diwujudkan melalui setiap kebijakannya, baik kebijakan domestik, maupun kebijakan politik luar negerinya.

Berdasarkan hal tersebut, Presiden Duterte menyatakan kebijakan politik luar negeri Filipina yang independen, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan-hubungan yang dijalin bersama negara lainnya seperti Cina. Itulah sebabnya, Filipina mulai menjauh dari pengaruh Amerika Serikat yang tidak mendukung kebijakannya, dan Filipina di bawah Presiden Duterte mulai mendekati Cina, yang telah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Filipina tersebut.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Idiosinkretik (Idiosyncratic)

Idiosinkretik (*idiosyncratic*) merupakan penggabungan istilah yang terbentuk dari penggabungan kata *ideology* dan *syncratic* atau *syncratis*. Ideologi menurut Anthonio Gramsci adalah kerangka atau paradigma analisis untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian yang dimaksud *syncratic* adalah perpaduan semua yang baik dari semua yang ada. *Idiosyncratic* dapat digunakan dalam analisa politik luar negeri suatu negara bila pengaruh yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pembuatan kebijakan adalah total.

Menurut pemikiran James N. Rosenau, ada empat sumber-sumber yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri yaitu salah satunya idiosinkratik (*idiosyncratic sources*) yang merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai. Secara lebih singkat, James Coulombis dan Wolfe mendefinisikan faktor *idiosyncratic* sebagai salah satu variabel yang berkaitan dengan persepsi, citra (*image*), dan karakteristik pribadi individu pembuat keputusan. (James N. Rosenau 1976)

Sedangkan *idiosyncratic* menurut H.C Warren adalah keseluruhan pengaturan mental seseorang pada tahap manapun dalam perkembangannya. Ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia, intelektualitas, temperamen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang telah dibangun tersebut.

Hubungan Bilateral

Secara sederhana hubungan bilateral diartikan sebagai hubungan timbal balik antar dua negara yang terjalin meliputi berbagai isu, yaitu di bidang politik, militer, pertahanan dan keamanan, ekonomi, budaya dan pendidikan yang dibangun melalui kesamaan kepentingan dan persepsi. (Budiono, 1987)

Dengan demikian, hubungan bilateral tersebut dijalin tanpa mempermasalahkan letak geografis suatu negara, namun menekankan bagaimana kedua negara dapat berinteraksi untuk memenuhi kepentingan nasional di berbagai bidang.

Kepentingan nasional adalah sebagai dasar dalam menjelaskan bagaimana karakteristik negara tersebut dalam menjalin hubungan internasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan

para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. (Banyu & Yani, 2005)

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional dapat digambarkan dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. (KJ Holsti, 1998)

Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kerjasama.

Sementara pada penjelasan lain tentang konteks hubungan bilateral yang kedua, apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Konflik adalah kondisi adanya suatu perbedaan pendirian antar kelompok termasuk posisi yang hendak dicapai. Konflik internasional meliputi tindakan ancaman dan hukuman yang bersifat diplomatik, propaganda, komersial, atau militer yang diambil oleh pihak yang menentang terhadap pihak yang lain.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik, yaitu berupaya untuk menggambarkan dan menganalisa pengaruh kepemimpinan Presiden Duterte terhadap hubungan bilateral Filipina dengan Cina. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka (library research) dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, dan data-data dari internet yang tingkat kapabilitasnya terhadap permasalahan yang dihadapi dan validitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang di peroleh dari penelitian, menggunakan metode kualitatif. Dalam menganalisis permasalahan di gambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan fakta lainnya.

Hasil Penelitian

Pasca dilantiknya Duterte menjadi Presiden pada 30 tahun 2016 maka Presiden Duterte mulai melaksanakan visi misinya terhadap Filipina yang telah dikampanyekan olehnya sebelum pemilu, salah satunya dalam politik luar negeri Filipina, Presiden Duterte melakukan tindakan untuk menjauh dari Amerika Serikat dan melakukan pendekatan terhadap Cina dalam hubungan luar negeri Filipina. Kepemimpinan Presiden Duterte kemudian menimbulkan perubahan khususnya dalam hubungan bilateral Filipina dengan Cina. Memasuki masa pemerintahan yang

baru, Filipina dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, sebagai Presiden Filipina ke-16, yang memulai kebijakan-kebijakan yang berbeda dari yang sebelumnya. Hal yang dapat dilihat, bahwa kebijakan setiap periode pemerintahan akan berbeda dan terus mengalami perubahan, karena gagasan, pemikiran dan juga kepribadian masing-masing pemimpin juga berbeda.

Pengaruh Idiosinkretik dalam Kepemimpinan Presiden Duterte

Dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, terutama mengenai hubungan bilateral Filipina dengan Cina oleh Presiden Duterte dipengaruhi oleh faktor idiosinkretiknya yang membentuk sosok Duterte saat ini. Idiosinkretik digunakan dalam analisa politik luar negeri yang melihat nilai-nilai (*value*), pengalaman (*experience*), bakat (*talent*) serta kepribadian elit politik (*personality of leaders*) yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Berdasarkan gambaran umum mengenai Presiden Duterte diketahui faktor-faktor idiosinkretik yang “*determinant*” dalam kepemimpinan Presiden Duterte adalah :

1. Nilai (Value)

Nilai yang dianut Duterte ialah menjunjung rasa nasionalisme, rasionalitas, dan menjunjung kebenaran yang teguh dianutnya. Nilai yang dianut Presiden Duterte bukan hanya berasal dari satu agama atau ideologi, namun dari interaksinya dengan berbagai agama dan ideologi yang ada di lingkungan sosialnya. Hal tersebut dikarenakan anggota keluarga Presiden Duterte berasal dari berbagai suku dan agama. Selain itu, dalam kesehariannya sejak muda Presiden Duterte bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk para preman, tentara, polisi dan bahkan kaum komunis serta gerakan pembebasan Bangsa Moro. Bahkan Jose Maria Sison, pendiri Partai Komunis Filipina dan sayap militernya Tentara Rakyat Baru, pernah menjadi gurunya.(seword.com) Indikator ini membentuk persepsi dan prinsipnya yang tidak diskriminatif berasal pada satu sudut pandang saja, berpikir rasional dalam mengambil keputusan.

Nilai-nilai yang dianut dapat terlihat dari tindakan yang dilakukan Presiden Duterte yaitu menyelesaikan konflik dalam negeri Filipina dengan kelompok minoritas di Filipina (Moro Islamic Liberation Front, dan Partai Komunis) dengan damai.(www.thenational.ae) Duterte melihat bahwa kelompok-kelompok minoritas yang terlibat konflik tersebut masih merupakan bagian dari satu bangsa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, sehingga dirinya secara rasional memutuskan untuk melakukan pembicaraan secara damai agar konflik segera selesai tanpa kekerasan supaya tidak menambah kerugian bagi negara sendiri.

Nilai-nilai ini pula yang membuat Duterte ingin bekerja sama dengan Cina, karena secara rasional menganggap dengan adanya kerjasama akan meningkatkan ekonomi negara dan dirinya juga berusaha menyelesaikan konflik wilayah dengan damai sehingga negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar jika melakukan konfrontasi perang, karena Duterte juga menyadari

lemahnya militer Filipina dibandingkan Cina bila melakukan konfrontasi militer, sehingga dianggap perlu menjalin hubungan baik agar perekonomian dapat semakin berkembang.(www.qz.com) Hal tersebut menyebabkan pada oktober 2016, Presiden Duterte membatalkan patroli gabungan angkatan laut Amerika – Filipina di Laut Cina Selatan, agar tidak dianggap memprovokasi Cina. Duterte menyatakan bahwa Filipina akan berhenti bergabung dengan Angkatan Laut AS dalam berpatroli di Laut Cina Selatan agar tidak mengganggu Beijing. (www.rt.com)

2. Kepribadian (Personality of Leaders)

Kepribadian Presiden Rodrigo Duterte adalah keras dan berani dalam mengambil keputusan dan bertindak. Kepribadian Presiden Duterte juga terlihat dalam kebijakan yang dilaksanakan Presiden Duterte, Kebijakan *War on Drugs*. Kebijakan berani Presiden Duterte dalam hal pemberantasan penjahat narkoba dengan menembak mati setiap penjahat narkoba. Bahkan dia juga memberikan kekebalan terhadap polisi dari peradilan atas pembunuhan yang dilakukan terhadap penjahat narkoba.

Filipina berkomitmen memerangi narkoba dan memperlakukan kasus narkoba sebagai kejahatan luar biasa atau *Extraordinary Crime* dan menjatuhkan hukuman berat bahkan memberlakukan sistem tembak di tempat yang dilakukan polisi.(www.bbc.com)

Keputusannya itu menuai kritik dari Amerika Serikat dan negara-negara eropa barat, serta PBB dengan organisasi HAM internasional yang mengecam kebijakan yang dianggap melanggar HAM. Kebijakan dalam negeri ini kemudian berpengaruh dengan keputusan Presiden Duterte dalam kebijakan luar negeri Filipina. Amerika Serikat sebagai negara aliansi Filipina selama bertahun-tahun, yang pada masa pemerintahan Barrack Obama mengecam kebijakan Duterte ini yang dinilai tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan embargo senjata ke Filipina, karena Filipina dianggap melanggar hak asasi manusia dalam kebijakannya domestik. Namun, kepribadiannya yang keras dan berani membuat Presiden Duterte tidak mau berkompromi dan tidak mau tunduk pada tekanan internasional. Kendati banyak dikecam pembela HAM karena aksi main bunuh penjahat narkoba, Duterte dengan tegas menyatakan tetap akan menjalankan kebijakannya tersebut. (www.pressreader.com)

Hal tersebut pula yang membuat Presiden Duterte mengambil tindakan untuk mulai menjauh dari pengaruh Amerika Serikat yang tidak mendukung kebijakannya, dan tidak ingin lagi bergantung pada kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, sehingga Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Duterte mulai mendekati Cina, yang menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Filipina tersebut.

Keberanian Presiden Duterte juga diperlihatkan saat berkunjung di Cina dengan mengumumkan memutuskan hubungan militer dan ekonomi dengan Amerika Serikat pada acara *Philippine-China Trade & Investment Forum* sebagai bentuk keseriusannya meningkatkan kerjasama dengan Cina. (edition.cnn.com) Pernyataan Presiden Duterte tersebut berhasil membuat Presiden Duterte mendapat investasi dari Cina sebesar US\$ 17 miliar (South China Morning Post) dan pernyataan tersebut kemudian dibuktikan dengan menjadi poin-poin dalam kebijakan luar negeri yang dilaksanakannya, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat, tapi tetap menjaga sejarah hubungan dengan Amerika Serikat dan meningkatkan hubungan dengan Cina. (thediplomat.com)

3. *Bakat (Talent)*

Bakat yang dimiliki Presiden Duterte yang jelas terlihat adalah bakat manajemen politik dan kepemimpinan dalam bidang politik. Bakat yang dimilikinya sejak kecil karena dikelilingi oleh banyak anggota keluarga yang terlibat di dalam dunia politik. Hal tersebut membuat Presiden Duterte terbiasa melihat cara-cara berpolitik.

Bakat kepemimpinannya itulah yang membuat Presiden Duterte piawai dalam melakukan kampanye kepresidenannya dengan pernyataan-pernyataan yang sering dikeluarkan Presiden Duterte sering mengundang kontroversi, sehingga meyakinkan masyarakat untuk memilihnya dalam Pemilu 2016 Filipina dan berhasil menang melawan kandidat lainnya dengan perbedaan suara yang cukup besar, serta membuatnya selalu yakin dalam memutuskan kebijakan-kebijakannya. Menurut survey yang dilakukan oleh Pulse Asia, tingkat kepercayaan warga Filipina terhadap Presiden Duterte mencapai 91 persen.(th.boell.org)

Kemampuan manajemen Presiden Duterte terlihat dalam rumusan kebijakan luar negerinya untuk meningkatkan hubungan dengan partner non-tradisional Filipina, termasuk dengan Cina agar dapat semakin meningkatkan perkembangan Filipina dalam berbagai sektor. Manajemen yang dilakukan Presiden Duterte sendiri agar perekonomian Filipina dapat berkembang dengan memperluas kerjasama dengan negara-negara lain sejalan dengan paham ekonomi terbuka yang dianut oleh Cina gagasan Deng Xiaoping. Sehingga diharapkan kebijakannya untuk penanganan kemiskinan di Filipina dapat terlaksana. (newsinfo.inquirer.net)

4. *Pengalaman (Experience)*

Sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung di dalam dunia politik, Presiden Duterte adalah sosok yang sangat berpengalaman dalam politik terutama dalam menjadi pemimpin bagi masyarakat Filipina. Pengalaman dalam politik dari Rodrigo Duterte bermula dari latar belakang pendidikan politik di *Lyceum of the Philippines University* serta melanjutkan kuliah jurusan hukum di

San Beda College Law dan lulus pada tahun 1970. Selain itu, pengalaman sebagai politikus yang memiliki karir politik yang panjang (Walikota Davao selama 22 tahun, Wakil Walikota, anggota Dewan) serta pengalamannya dalam bersosialisasi dan membantu kelompok-kelompok minoritas.(Biography.com)

Pengalamannya yang telah banyak bersentuhan dengan kepentingan rakyat Filipina yang ia emban tersebut telah membuatnya menjadi piawai dalam memahami pemikiran masyarakat dan mengetahui kondisi Filipina, serta paham bagaimana cara untuk mengambil kebijakan yang memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat Filipina. Presiden Duterte menunjukkan tekadnya untuk membawa perubahan di negara Filipina. “*Real change, this is the direction of our government*”, itulah yang dikatakan Presiden Duterte saat dilantik sebagai presiden dan sedang berusaha diwujudkan melalui setiap kebijakannya. Beberapa kebijakan Presiden Duterte saat menjabat walikota Davao coba dilaksanakan dalam skala nasional, seperti program Keluarga Berencana (*Birth Control*,) menetapkan jam malam bagi anak-anak, larangan merokok ditempat umum, serta larangan karaoke dan minuman keras pada tengah malam. (www.bbc.com)

Selain itu, dengan pengalamannya saat menjadi walikota Davao, dimana setiap pemimpin daerah untuk bebas mengatur daerahnya masing-masing dengan adanya otonomi daerah, terbawa hingga ia menjadi Presiden. Hal itu membuat Presiden Duterte meyakini bahwa setiap negara itu independen dan berhak menyelesaikan urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari pihak luar. Sehingga Presiden Duterte tidak ingin memberikan status khusus kepada pihak manapun untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan yang dijalankan Filipina, termasuk Amerika Serikat.

Berdasarkan hal tersebut, Presiden Duterte menyatakan kebijakan politik luar negeri Filipina yang independen, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan-hubungan yang dijalin bersama negara-negara lainnya termasuk dengan Cina. Keuntungan tersebut dapat berupa stabilitas kawasan, kepentingan ekonomi, dan sebagainya. Filipina meyakini bahwa hubungan yang baik dengan semua negara, mendatangkan keuntungan, bahkan lebih banyak lagi, daripada hanya berpihak atau bergantung pada salah satu negara. Selain itu, sikap Filipina terhadap negara-negara lain bergantung pada respon negara-negara tersebut dalam mendukung kebijakan-kebijakan Filipina, tentunya Presiden Duterte menginginkan iklim yang mendukung kebijakan-kebijakannya. Cina kemudian menjadi negara yang bersedia mendukung Presiden Duterte dalam menjalankan kebijakannya di Filipina dengan berbagai bantuan dan kerjasama.

Kondisi Hubungan Bilateral Filipina dengan Cina pada kepemimpinan Presiden Duterte

Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte membuat perubahan dalam politik luar negeri Filipina, terutama dalam memenuhi visi dan misinya dengan melakukan re-

orientasi pendekatan hubungan baik dengan Cina. Hal tersebut akan kita lihat pada kondisi hubungan Filipina dengan Cina pada perubahan tingkat kerjasama dan konflik antara Filipina dan Cina dimasa pemerintahan Presiden Duterte.

Berdasarkan KJ. Holsti, untuk melihat bagaimana kondisi hubungan bilateral antara dua negara dapat dilihat dari tingkat kerjasama dan konflik yang terjadi antara kedua negara. Sehingga untuk mengetahui kondisi hubungan bilateral Filipina dengan Cina pada masa kepemimpinan Presiden Duterte akan dilihat tingkat kerjasama dan konflik Filipina dengan Cina yang terjadi.

1. Peningkatan Kerjasama Filipina dengan Cina Pada Masa Kepemimpinan Presiden Duterte.

Presiden Rodrigo Duterte menjalankan kebijakan luar negeri yang kooperatif dengan Cina demi kepentingan nasional negara Filipina. Hal ini terlihat dari tindakan yang diambil Presiden Rodrigo Duterte yang meminta bantuan militer kepada Cina dalam menangani kasus Abu Sayyaf yang telah menjadi ancaman bagi keamanan negara Filipina itu sendiri dan juga negara-negara di sekitarnya. Situasi domestik Filipina ini menjadi bagian dari pertimbangan Presiden Rodrigo Duterte dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya yang kooperatif.(www.cnnindonesia.com)

Hal yang penting yang diperhatikan Presiden Rodrigo Duterte juga mengenai kebijakan dalam negerinya dalam memberantas kejahatan transnasional di Filipina. Berbeda dengan respon Amerika Serikat, Cina malah mendukung kebijakan Filipina tersebut dalam upaya pemberantasan narkoba, dengan menawarkan bantuan militer, yang berupa peralatan militer gratis. Total peralatan militer tersebut senilai 14 juta dollar Amerika atau sekitar 188 miliar rupiah. Selain itu, Cina juga menawarkan pinjaman lunak jangka panjang senilai 500 juta USD.(www.bbc.com)

Dalam kunjungan kenegaraannya di Cina 21 October 2016, Presiden Rodrigo Duterte bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan melakukan pembicaraan mengenai hubungan kedua negara. Sebagai hasilnya, kedua belah pihak mengakui ikatan persahabatan antara orang-orang Filipina dan China selama berabad-abad dan sepakat untuk terus melakukan upaya bersama untuk memperkuat persahabatan tradisional antara kedua negara. Filipina dan China juga menegaskan kembali kemitraan mereka dan aspirasi bersama mereka untuk mencapai pertumbuhan pembangunan dan inklusif bagi masyarakat mereka sehingga kedua negara menyetujui dan menandatangani *Joint Statement of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*. (www.dfa.gov.ph)

Dalam perjanjian tersebut, kedua negara bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk kawasan Laut Cina Selatan. Kedua negara bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di antara masing-masing negara. Kerjasama tersebut oleh Presiden Rodrigo Duterte dan Presiden Xi Jinping dilanjutkan dengan penandatanganan tiga belas *Memorandum of Understanding*

antara Filipina dengan Cina.(www.fmprc.gov.cn) Sejumlah MOU tersebut meningkatkan kerjasama di antara masing-masing negara dalam bidang ekonomi, dan keamanan yang semakin memperbaiki hubungan kedua negara.

Kebijakan politik luar negeri Presiden Rodrigo Duterte yang kooperatif terhadap Cina makin terlihat sebagai reorientasi pendekatan kepada Cina yang sempat tidak berjalan pada Presiden sebelumnya, Benigno S Aquino III yang bisa dilihat dari perbandingan jumlah kerjasama bilateral filipina dengan cina pada setiap masa pemerintahan Presiden Filipina.(www.beijingpe.dfa.gov.ph)

- a. Ferdinand Marcos, 1975 – Januari 1986 (8 Agreements)
- b. Corazon Aquino, Februari 1986 – Juni 1992 (3 Agreements)
- c. Fidel Ramos, Juli 1992 – Juni 1998 (3 Agreements)
- d. Joseph Estrada, Juli 1998 – pertengahan Januari 2001 (8 Agreements)
- e. Gloria Macapagal Arroyo, Januari 2001 – Juni 2010 (61 Agreements)
- f. Benigno S Aquino III Juni 2010 – Juni 2016 (2 agreements)
- g. Rodrigo Duterte Juni 2016 – saat ini (13 agreements)

Dari jumlah agreement yang dilakukan, terlihat bahwa Presiden Duterte yang belum genap setahun menjabat sudah banyak melakukan kerjasama dengan Cina dibandingkan Presiden sebelumnya. Hal ini makin menguatkan bahwa kebijakan Luar Negeri Presiden Duterte untuk meningkatkan kerjasama dengan Cina.

Kerjasama yang dilakukan antara Filipina dengan Cina turut berpengaruh besar dibidang ekonomi, seperti adanya peningkatan kerjasama perdagangan, khususnya ekspor buah-buahan tropis berupa pisang dan nanas dari Filipina. Selama ini Filipina merupakan pemasok pisang dengan total 82 persen, dan nanas sebesar 70 persen dari pangsa pasar yang ada di Cina. Pada 2012, dengan memanasnya hubungan kedua negara akibat sengketa di Laut China Selatan, mengakibatkan produk buah-buahan Filipina seperti pisang dan nanas sempat dipersulit untuk masuk pasar Tiongkok. (ekonomi.metrotvnews.com)

Tercatat pada April 2017, dalam hubungan perdagangan antara kedua negara, Cina masih menjadi sumber impor terbesar Filipina pada 18.1 persen. Transaksi tercatat sebesar \$1.240 miliar, menurun 9.0 persen dari \$1.363 miliar pada April 2016. Sementara pendapatan dari ekspor Filipina ke Cina mencapai \$ 501,20 juta, meningkat 23.6 persen dari \$405.65 juta pada tahun 2016. (psa.gov.ph)

Selain itu adanya kerjasama dalam bidang ekonomi berupa investasi Cina di Filipina sebesar \$24 miliar semakin menunjukkan “*greater confidence*” pada masa depan hubungan ekonomi kedua negara. Sekretaris perdagangan Filipina, Ramon Lopez mengatakan hubungan kedua negara yang telah diperbaharui ini membuka kesempatan untuk perdagangan dan investasi Filipina dalam pasar Cina dan ASEAN. Adanya kesepakatan yang didapat Presiden Duterte setelah berkunjung ke Cina yang diharapkan meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Tercatat telah ada sekitar 25 proyek yang sudah ditandatangani sebesar \$15 miliar.(business.inquirer.net)

Dari kerjasama-kerjasama tersebut Filipina mengharapkan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu semakin meningkatkan hubungan baik antara kedua negara yang telah lama berinteraksi dalam perdagangan dan mengerti tentang kedua wilayah.

Peningkatan kerjasama yang dilakukan oleh Presiden Duterte tersebut semakin menunjukkan keseriusan Presiden Duterte yang ingin membangun kerjasama dengan Cina, dan kerjasama yang dibangun tidak terlepas dari target dalam hubungan luar negeri Filipina khususnya dalam bidang keamanan dan ekonomi Filipina.

2. Berkurangnya Konflik Filipina dengan Cina Pada Masa Kepemimpinan Presiden Duterte

Konflik antara Filipina dan Cina yang terjadi ialah konflik wilayah terkait wilayah Laut Cina Selatan yang sudah lama berlangsung, Cina berkeyakinan bahwa wilayah Laut Cina Selatan merupakan peninggalan dinasti Han yang sudah seharusnya menjadi bagian atas kedaulatan Cina, dan sejak tahun 1971 Filipina secara resmi menyatakan 8 pulau di Spratly sebagai bagian dari provinsi Palawan.

Di pemerintahan Presiden Benigno III, hubungan kedua negara kemudian berada di tingkat yang mengkhawatirkan saat dilakukannya petisi arbitrase oleh pemerintah Filipina terhadap Cina kepada Mahkamah Internasional Atas Hukum Laut (ITLOS) pada Maret 2014 untuk menyelesaikan konflik wilayah di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut kemudian bertambah kompleks dengan adanya kerjasama EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) antara Filipina dengan Amerika Serikat, yang akan berfungsi mengurangi aktivitas Cina di Laut Cina Selatan.

Selain itu keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016, terkait klaim tumpang tindih Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan, menyatakan kemenangan di pihak Filipina, berdasarkan UNCLOS 1982. Namun keputusan tersebut tidak bisa diterima oleh Cina, yang tetap bersikeras terhadap wilayah Laut Cina Selatan yang di klaimnya.

Kepemimpinan Presiden Duterte kemudian berpengaruh dalam konflik yang ada antara Filipina dengan Cina, terutama mengenai Laut Cina yang sudah lama terjadi, dan merupakan konflik utama dari kedua negara yang belum menemui solusi. Filipina dibawah kepemimpinan Presiden Duterte terus mengupayakan penyelesaian konflik Laut Cina Selatan dengan damai, dengan mempromosikan dan meningkatkan perdamaian dan kestabilan dalam kawasan.

Presiden Duterte memilih menangani masalah tersebut mengedepankan rasionalitas dalam kebijakan luar negerinya. Presiden Rodrigo Duterte memilih untuk mengambil pendirian yang lebih ramah atau bersahabat dengan Cina. Presiden Rodrigo Duterte memilih melakukan dialog dengan Cina terkait sengketa kepulauan di Laut Cina Selatan untuk menormalisasi hubungan bilateral antara Filipina dan Cina.

Dampak perbedaan kebijakan yang dilakukan Presiden Duterte terlihat pada Oktober 2016, saat nelayan Filipina sudah diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan *Scarborough Shoal* tanpa dihalangi oleh penjaga pantai Cina yang berbanding terbalik pada tahun sebelumnya. (iapsdialogue.org)

Pendekatan yang lebih damai terhadap Cina daripada Benigno III dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte sebagai usaha untuk menarik investasi dari Cina. Jika Filipina meneruskan tuntutananya terhadap Cina terkait isu Laut Cina Selatan tersebut, maka Filipina kemungkinan akan kehilangan mitra dagang yang cukup membantu perekonomian Filipina dan memiliki potensi yang besar dalam memberikan modal pembangunan infrastruktur bagi Filipina.

Perubahan makin terlihat pada saat Presiden Rodrigo Duterte bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan melakukan pembicaraan mengenai hubungan kedua negara dalam kawasan Laut Cina Selatan. Kedua negara bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di antara masing-masing penjaga-penjaga pantai untuk memperhatikan situasi perairan sekitar, dan juga memperhatikan prinsip kemanusiaan dan lingkungan di Laut Cina Selatan. (www.fmprc.gov.cn)

Presiden Rodrigo Duterte bersama Presiden Xi Jinping telah menandatangani *Memorandum of Understanding* antara *the Philippine Coast Guard* dan *the China Coast Guard* pada pendirian *Joint Coast Guard Committee on Maritime Cooperation*. Hal ini ditindak lanjuti dengan pertemuan yang diadakan kedua negara di Manila untuk mendiskusikan formasi *Joint Coast Guard Committee on Maritime Cooperation*. (thediplomat.com)

Pada oktober 2016 Presiden Duterte pun membatalkan patroli gabungan angkatan laut Amerika – Filipina di Laut Cina Selatan, agar tidak dianggap memprovokasi Cina.(www.rt.com) Hal tersebut berlanjut pada kebijakan EDCA yang dilakukan oleh presiden sebelumnya Aquino III pada 2014, untuk meningkatkan kerjasama militer dengan AS di Laut Cina Selatan untuk menghadapi Cina. Presiden Duterte pada 29 Januari 2017 memutuskan untuk menghentikan implementasi kebijakan tersebut dan akan meninjau ulang. Hal itu dikarenakan pembangunan infrastruktur militer yang akan dibangun AS dianggap beresiko mengganggu stabilitas wilayah antara Filipina dan Cina. (www.stratfor.com)

Serta adanya rencana Presiden Duterte melakukan patroli gabungan antara Filipina dengan Cina di laut Sulu, yang juga dalam rangka menekan kelompok terror Abu Sayyaf di Mindanao sehingga dapat meningkatkan keamanan kawasan tersebut.(news.abs-cbn.com)

Berdasarkan analisis diatas dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Presiden Duterte membawa perubahan yang positif bagi hubungan antara Filipina dengan Cina. Dalam kepemimpinannya kerjasama-kerjasama antara kedua negara semakin bertambah dan konflik antara kedua negara dapat diminimalisir.

Kesimpulan

Sejak terpilih menjadi Presiden ke-16 Filipina, Presiden Rodrigo Duterte menyadari hubungan Filipina dengan Cina saat itu sedang dalam kondisi yang kurang baik. Presiden Rodrigo Duterte berusaha kembali membangun hubungan Filipina dan Cina yang sebenarnya sudah terjalin cukup lama dalam sejarah kedua negara.

Terlihat bahwa perubahan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte yang sangat berbeda pada masa pemerintahannya dibandingkan pemerintahan sebelumnya, perbedaan tersebut terlihat dari kebijakan dalam negeri dan berdampak pada kebijakan politik luar negerinya.

Idiosinkretik Duterte memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikrinya dan yang membuatnya memiliki pandangan berbeda dalam kepemimpinannya sebagai Presiden dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya terutama terkait hubungan bilateral Filipina dengan Cina. Karakter Duterte yang keras, berani dan Nasionalis, menjadikannya dia berupaya keras untuk memajukan Filipina bagaimanapun caranya, termasuk bersikap baik/kooperatif terhadap Cina termasuk dalam konflik Laut China Selatan demi tercapainya tujuan negara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemimpinan Presiden Duterte terhadap hubungan bilateral antara Filipina dengan Cina membawa pengaruh positif di dalam hubungan kedua negara dengan meningkatnya jumlah kerjasama dan usaha penyelesaian dengan damai dalam konflik Laut Cina Selatan antara Filipina dengan Cina dibandingkan pemerintahan presiden sebelumnya.

Daftar Pustaka

Buku

Holsti, KJ., 1998, M. Tahir Azhary, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta : Erlangga.

Kusumohamidjojo, Budiono, 1987, *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Bina Cipta.

Perwita, Anak Agung Banyu. dan Yani, Yanyan M., 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.

Rosenau, James N. Boyd, Gavid. dan Thompson, Kenneth W., 1976 *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press

Jurnal

Adawiyah, Rabiyyatul. *Keputusan Pemerintah Hugo Chavez Untuk Keluar Dari Keanggotaan International Monetary Fund (IMF) Tahun 2007*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015.

Lim, Benito. *The Political Economy of Philippines-China Relations*. Philippine APEC Study Center Network (PASCN) Discussion Paper No. 99-16.

Tuazon, Bobby M. *The Highs and Lows of Philippines-China relations: Current Situation and Prospects*, Center for People Empowerment in Governance (CenPEG), disampaikan pada kuliah umum Guangxi Academy of Social Sciences, Institute of Southeast Asian Studies, 2014.

Velasco, Mark Anthony M.. *Philippines – China Relations: The Case of the South China Sea (Spratly Islands) Claims*. De La Salle University-Manila, Philippines, 2014.

Scott, William Hemy, *Filipinos in China before 1500* De La Salle University-Manila, Philippines, China Studies Program, 1989.

Internet

A Brief Historical Background, dalam <http://www.geocities.jp/cbnetnagoya/update/historical.html> diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

Duterte sampaikan 'berpisah' dari Washington, AS minta penjelasan, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161020_dunia_as_duterte, diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

Filipina Minta Bantuan China dan AS Lawan Abu Sayyaf, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20170209133457-106-192333/filipina-minta-bantuan-china-dan-as-lawan-abu-sayyaf/> diakses tanggal 28 Mei 2017.

Filipina Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan dengan Tiongkok, <http://ekonomi.metrotvnews.com/globals/5b27104k-filipina-tingkatkan-kerja-sama-perdagangan-dengan-tiongkok>, diakses 11 Juni 2017.

Foreign Trade Statistics of the Philippines: 2013, <https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-first-semester-2013> diakses pada tanggal 19 Desember 2016

How China's military buildup threatens the US, dalam <http://www.cnn.com/2015/10/12/chinas-military-and-naval-buildup-in-south-china-sea-threatens-the-us.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

Itemized list of PH projects covered by China's \$15-B investment pledges to Duterte, <http://business.inquirer.net/217269/itemized-list-ph-projects-covered-chinas-15-b-investment-pledges-duterte>, diakses 11 Juni 2017.

Japan's \$2-B loan to fund Philippines's largest railway system dalam <http://www.philstar.com/business/2015/11/27/1526565/japans-2-b-loan-fund-philippines-largest-railway-system> diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

Joint Statement of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. Beijing, 21 Oktober 2016. No. 18. [Http://www.dfa.gov.ph/newsroom/dfa-releases/10748-joint-statement-of-the](http://www.dfa.gov.ph/newsroom/dfa-releases/10748-joint-statement-of-the)

republic-of-the-philippines-and-the-people-s-republic-of-china. Diakses tanggal 28 Mei 2017

Joint Statement Of The People's Republic Of China And The Republic Of The Philippines, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1407682.shtml diakses tanggal 1 Juni 2017.

Kronologi Konflik Laut China Selatan, <http://www.cariram.xyz/2016/05/kronologi-konflik-laut-china-selatan.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

List Of Phl-China Bilateral Agreements, <http://www.beijingpe.dfa.gov.ph/list-of-bilateral-agreements/84-phl-chn-relations> diakses 4 Juni 2017.

Menelisik Kerjasama Militer Jepang dan Filipina, dalam <http://indonesian.tribune.com/indonesian/irib/ir/editorial/fokus/item/96336-menelisik-kerjasama-militer-jepang-dan-filipina?tmpl=component&print=1> diakses pada tanggal 19 Desember 2016.

Philippine Exports and Imports Performance: April 2017, <https://psa.gov.ph/content/philippine-exports-and-imports-performance-april-2017>, diakses 11 Juni 2017.

Phl-China Relations, dalam <http://beijingpe.dfa.gov.ph/phl-Cina-relations> diakses pada tanggal 26 desember 2016.

Presiden Duterte ditawarkan peralatan militer gratis Rp188 miliar oleh Cina, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38378805> diakses tanggal 29 Mei 2017

Reopening Of US Naval Base In Philippines Could Fuel South China Sea Row. dalam <http://investvine.com/reopening-of-us-naval-base-in-philippines-could-fuel-south-china-sea-row/> diakses pada tanggal 20 Maret 2017.